



Risalah Kebijakan

Nomor 9, Oktober 2022



Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Asesmen Nasional pada Jenjang Sekolah Dasar



Ringkasan

Asesmen Nasional merupakan proses evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk memetakan mutu satuan pendidikan. Risalah kebijakan ini memotret pelaksanaannya di jenjang sekolah dasar karena di jenjang ini ujian berbasis komputer belum pernah dilakukan, sehingga disinyalir dapat menimbulkan berbagai kendala.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Asesmen Nasional mendorong sekolah untuk fokus pada penyiapan sarana prasarana, meningkatkan keterampilan mengoperasikan komputer, dan pelatihan soal-soal AKM, daripada mengubah strategi pembelajaran. Fokus ini selaras dengan kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam pelaksanaan Asesmen Nasional, yaitu ketersediaan perangkat TIK, kesulitan dalam melakukan penggantian peserta, serta anggaran untuk mendukung Asesmen Nasional.

Supaya pelaksanaan Asesmen Nasional sesuai dengan tujuannya, risalah kebijakan ini menyarankan: a) perlunya mendorong transformasi pembelajaran agar sekolah tidak terjebak dengan hanya melatih siswa dengan soal-soal AKM, b) memberikan dukungan sarana prasarana yang dibutuhkan melalui bantuan maupun mengoptimalkan dana BOS, dan c) meningkatkan kualitas penyelenggaraan Asesmen Nasional dengan meluaskan sosialisasi, memperbaiki mutu dan variasi soal, menjamin keandalan server, serta meningkatkan sinkronisasi data peserta Asesmen Nasional.

Konteks

Asesmen Nasional merupakan proses evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk memetakan mutu satuan pendidikan. Pemetaan dilakukan di semua sekolah/madrasah termasuk program pendidikan kesetaraan dan dirancang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Landasan pelaksanaan Asesmen Nasional adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 57 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 yang menegaskan bahwa Asesmen Nasional adalah bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Operasionalisasi UU Sisdiknas dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Dalam Permendikbudristek tersebut dijelaskan bahwa Asesmen Nasional dilaksanakan melalui 3 (tiga) instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi dan Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Asesmen Nasional diharapkan dapat menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

Kebijakan Asesmen Nasional berpijak pada capaian mutu pendidikan Indonesia yang salah satu acuannya adalah hasil PISA 2018 yang memperlihatkan performa peserta didik Indonesia berada di bawah rata-rata untuk kemampuan matematika, sains, dan membaca. Disparitas mutu pendidikan juga terlihat dari kesenjangan antara Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dibandingkan daerah lainnya sebagaimana hasil *oversample* PISA 2018. Kedua provinsi tersebut memperoleh skor 35 poin lebih tinggi dari skor nasional. Pencapaian hasil skor kedua provinsi ini sejajar dengan negara-negara ASEAN lainnya (Kemendikbud, 2018).

Asesmen Nasional tidak ditujukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik, melainkan mengevaluasi kualitas pendidikan. Merujuk pada tujuan tersebut, diharapkan Asesmen Nasional dapat mengurangi kecemasan pemangku kepentingan, menghilangkan tekanan untuk curang, dan mengurangi beban siswa untuk melakukan persiapan khusus menghadapi Asesmen Nasional. Kajian yang dilakukan oleh Rohim, dkk. (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan Asesmen Nasional tidak bertujuan untuk melihat penguasaan siswa terhadap materi sesuai kurikulum seperti halnya Ujian Nasional (UN), melainkan berfokus pada penguasaan kompetensi literasi dan numerasi.

Asesmen Nasional digunakan sebagai pengukuran terhadap karakteristik penyelenggaraan pembelajaran. Johnson & Johnson (2002: 6) dalam Yusuf (2017: 13) menyatakan bahwa asesmen didefinisikan sebagai proses mengumpulkan informasi tentang kualitas dan kuantitas perubahan yang terjadi pada siswa, satuan pendidikan, guru, atau administrasi sekolah. Pendapat lain tentang asesmen dinyatakan oleh Kumano (2001) dalam Safithry (2018: 2) yang mendefinisikan asesmen sebagai *“the process of collecting data which shows the development of learning”*, yang bermakna bahwa asesmen digunakan untuk menilai proses belajar siswa. Agar capaian hasil asesmen optimal dalam memperlihatkan kondisi sesungguhnya, asesmen harus dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Hal ini diharapkan dapat memotivasi dan mengoptimalkan kegiatan belajar siswa, kemampuan mengajar guru, dan menyempurnakan program pengajaran pada satuan pendidikan (Poerwanti dkk., 2018: 7). Merujuk pada berbagai definisi dan konsep asesmen tersebut, dapat disimpulkan bahwa asesmen adalah proses pengukuran hasil belajar siswa yang terjadi pada satuan pendidikan untuk penyempurnaan program pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan Nehru (2019) menyimpulkan bahwa pelaksanaan Asesmen Nasional sebagai pengganti UN menggerakkan guru untuk kreatif dalam melaksanakan penilaian yang berbasis kemampuan literasi dan numerasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sudianto (2021) menyatakan persiapan menghadapi AKM tidak cukup hanya dengan meluruskan persepsi keliru mengenai Asesmen Nasional dan AKM, atau hanya memberi pemahaman mengenai konsep Asesmen Nasional, namun diperlukan juga peningkatan kompetensi guru dalam menghadapi AKM. Para guru perlu dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan

Higher-Order Thinking Skills (HOTS) dan menyusun soal dengan mengikuti kaidah standar HOTS yang diharapkan pemangku kepentingan. Novita, dkk. (2021) memperlihatkan bahwa pengetahuan calon guru terhadap Asesmen Nasional belum memadai. Baru 51% calon guru mengetahui konsep Asesmen Nasional dengan benar dan tepat. Meskipun begitu, sebagian besar guru (52%) menyatakan lebih memilih Asesmen Nasional dibandingkan UN.

Risalah kebijakan ini selanjutnya menjadi relevan untuk mengkaji lebih jauh mengenai implementasi Asesmen Nasional di satuan pendidikan dengan fokus pada pemahaman dan persepsi warga sekolah. Adapun tujuan risalah kebijakan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Asesmen Nasional oleh dinas pendidikan dan satuan pendidikan, menganalisis pola pikir atau persepsi pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan orang tua, menganalisis faktor penghambat pelaksanaan Asesmen Nasional yang dihadapi oleh dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua, serta merumuskan strategi peningkatan kualitas pelaksanaan Asesmen Nasional.

Risalah kebijakan ini ditulis berdasarkan studi yang dilakukan pada jenjang sekolah dasar di 763 sekolah pada tiga wilayah, yaitu Kota Cilegon, Kota Bekasi, dan Kabupaten Semarang. Penentuan ini dilakukan dengan dasar, pada jenjang SD belum pernah dilakukan ujian berbasis komputer, sehingga disinyalir akan banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Lingkup studi adalah pelaksanaan Asesmen Nasional yang dianalisis dari sisi *stakeholders*, yaitu dinas pendidikan dan sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dan diskusi kelompok terpumpun (DKT).

Simpulan #1: Persiapan Asesmen Nasional oleh sekolah cenderung fokus pada sarana prasarana, keterampilan mengoperasikan komputer, dan pelatihan soal, alih-alih mengubah strategi pembelajaran.

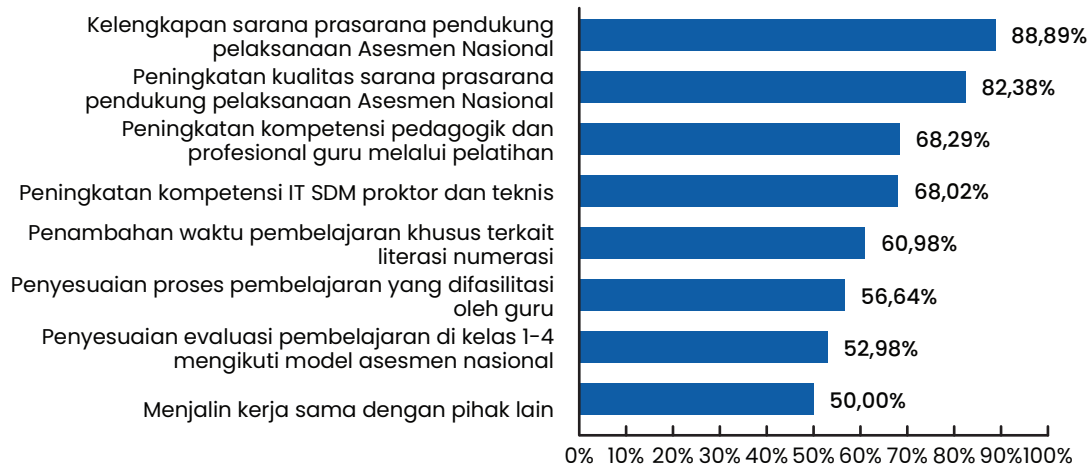
Harapan besar pemerintah terhadap penyelenggaraan Asesmen Nasional adalah perubahan sistem pembelajaran yang mengarah kepada kecakapan abad 21 sebagai arah tujuan pembelajaran. Kecakapan abad 21 tersebut tercermin dalam profil pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persiapan maupun rencana ke depan yang akan dilakukan oleh sekolah belum mengarah pada upaya mengubah strategi pembelajaran.

Secara umum, semua narasumber telah memahami bahwa Asesmen Nasional berbeda dengan UN/USBN dan tidak berpengaruh terhadap kelulusan siswa. Tetapi, belum semua kepala sekolah melakukan perubahan strategi pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Seyogianya hal ini merupakan prioritas untuk dilakukan sebagai konsekuensi diberlakukannya kebijakan Asesmen Nasional. Namun, fokus utama umumnya kepala sekolah saat ini masih pada isu penyediaan sarana prasarana pendukung Asesmen Nasional, seperti kelengkapan komputer atau laptop beserta jaringan internet dan listrik yang sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.

Sekolah dengan jumlah siswa yang besar cenderung mampu menyediakan sarana pendukung Asesmen Nasional sehingga mencukupi kebutuhan yang memenuhi syarat sebagai sekolah pelaksana Asesmen Nasional berstatus mandiri, bahkan berstatus mandiri dan ditumpangi. Namun, sekolah dengan jumlah siswa yang kecil masuk dalam kategori sekolah menumpang, dan kalau pun ada yang mampu memenuhi syarat masuk dalam status mandiri, ketersediaan sarana pendukungnya diperoleh dengan meminjam pada guru, siswa, atau pihak luar sekolah.

Persiapan lain yang dilakukan sekolah adalah mengupayakan latihan soal AKM kepada siswa kelas lima. Hal ini setidaknya dinyatakan oleh kepala sekolah di dua wilayah sampel penelitian, yaitu di Kota Cilegon dan Kabupaten Bekasi. Dua orang kepala sekolah menyatakan bahwa mereka membeli buku latihan soal Asesmen Nasional untuk seluruh siswa kelas lima.

Hal tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran sekolah bahwa jika siswa mendapatkan hasil yang tidak maksimal dalam Asesmen Nasional, dianggap akan memengaruhi kredibilitas sekolah dan menurunkan minat masyarakat mendaftar ke sekolah. Kekhawatiran semacam itu yang membuat kepala sekolah mengeluarkan kebijakan memberikan latihan soal AKM secara intensif kepada siswa kelas 5 dengan berbekal buku latihan soal, latihan soal AKM yang bersumber dari laman web Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar), bahkan *screenshot* soal-soal AKM saat simulasi.



Grafik 1 Rencana Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Asesmen Nasional

Terkait rencana kebijakan peningkatan kualitas pelaksanaan Asesmen Nasional ke depan, mayoritas responden kepala sekolah masih fokus melengkapi sarana prasarana (88,89%) dan meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung AN (82,38%). Sedangkan sebagai bentuk intervensi terhadap kualitas guru, kebijakan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah yaitu memberikan pengarahan dan pelatihan agar guru dapat melaksanakan pembelajaran lebih variatif (68,29%), penambahan waktu untuk pembelajaran literasi dan numerasi (60,98%), penyesuaian proses pembelajaran (56,64%), dan penyesuaian evaluasi pembelajaran (52,98%). Dari Grafik 1 tampak bahwa sarana dan prasarana masih menjadi konsentrasi utama dibandingkan perubahan dan penyesuaian dalam pembelajaran. Selain itu, perubahan pembelajaran justru mengerucut pada pembelajaran literasi dan numerasi yang diwujudkan dalam metode *drilling* dengan pelatihan berulang kali soal-soal AKM. Dalam hal ini, sekolah belum sepenuhnya menangkap arah dari kebijakan AN, bahwa AN dilakukan sebagai evaluasi sistem yang seharusnya diarahkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran bukan sekadar kemampuan literasi dan numerasi. Peningkatan kualitas pembelajaran secara umum dapat memperbaiki hasil belajar siswa dan indikator-indikator lainnya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah.

Sementara dari sisi dinas pendidikan, umumnya mereka telah memahami bahwa esensi dari Asesmen Nasional adalah perubahan strategi pembelajaran di kelas. Mereka juga menyadari bahwa kondisi di sekolah masih sangat beragam karena masih ada warga sekolah yang belum sepenuhnya paham dan siap beradaptasi dengan kebijakan Asesmen Nasional. Kekhawatiran yang dirasakan oleh dinas pendidikan adalah pelaksanaan Asesmen Nasional tidak berjalan lancar. Oleh karena itu, dinas pendidikan melakukan sosialisasi Asesmen Nasional kepada kepala sekolah dan proktor, terutama terkait tujuan dari Asesmen Nasional dan perubahan yang perlu dilakukan oleh sekolah. Upaya sosialisasi ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran guru penggerak sebagai narasumber dalam sosialisasi Asesmen Nasional. Mekanisme sosialisasi dilakukan baik melalui kegiatan sosialisasi khusus AN maupun melekat pada berbagai kegiatan lain yang diselenggarakan dengan melibatkan sekolah.

Selain itu, dinas pendidikan juga mengeluhkan persoalan yang sama, yaitu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Asesmen Nasional. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Semarang misalnya, menyatakan akan mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan Asesmen Nasional kepada pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan pelaksanaan AN di tahun depan, mereka berupaya melakukan pelatihan strategi pembelajaran berbasis literasi, numerasi, dan karakter dengan mengoptimalkan pelibatan guru-guru penggerak yang ada sebagai instruktur di daerah.

Simpulan #2: Sekolah-sekolah masih menghadapi kendala perangkat, penggantian peserta, serta anggaran untuk mendukung Asesmen Nasional.

Dalam melaksanakan Asesmen Nasional, sekolah berupaya memberikan sosialisasi kepada orang tua, meliputi keikutsertaan siswa dalam Asesmen Nasional, kapan siswa harus mengikuti simulasi, gladi bersih, dan pelaksanaan Asesmen Nasional. Dalam survei yang dilakukan, sebagian besar orang tua menyatakan setuju terhadap pelaksanaan Asesmen Nasional (91,91%), namun terdapat 8,1% orang tua yang menyatakan tidak setuju, dengan alasan terbesar karena anak-anak sudah terbiasa dengan Ujian Nasional (52,35%). Ujian Nasional juga dianggap memudahkan orang tua mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar anak, sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur menentukan kelanjutan studi ke jenjang berikutnya.

Peserta AN adalah siswa kelas 5 dengan keterwakilan 30 siswa sebagai peserta utama dan 5 (lima) siswa cadangan untuk setiap satuan pendidikan. Terkait dengan kepesertaan siswa, tidak semua sekolah melakukan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan ketika berhalangan hadir. Persentase terbesar sekolah yang tidak melakukan penggantian peserta Asesmen Nasional adalah sekolah swasta dengan status mandiri sebesar 50%, sementara sekolah menumpang yang tidak melakukan penggantian peserta terbanyak adalah sekolah negeri sebesar 33,3%. Alasan sekolah berstatus menumpang tidak melakukan penggantian peserta utama yang berhalangan hadir antara lain karena: a) kondisi geografis sekolah yang jauh dari sekolah induk tidak memungkinkan sekolah mengakomodasi penggantian dalam waktu maksimal 15 menit sebelum pelaksanaan Asesmen Nasional; b) jumlah siswa kelas lima tidak mencapai batas maksimal kepesertaan Asesmen Nasional; c) sumber daya sekolah tidak memadai untuk melakukan penggantian kepesertaan siswa dalam Asesmen Nasional. Alasan berbeda diungkapkan sekolah mandiri dan ditumpanginya terkait tidak melakukan penggantian kepesertaan siswa, salah satunya adalah kekhawatiran tidak dapat mencapai hasil Asesmen Nasional sesuai target yang direncanakan. Hal ini secara eksplisit disampaikan oleh salah seorang kepala sekolah di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Saya usul Bu, kalau seandainya Asesmen Nasional ini akan dilaksanakan setiap tahun, mohon kebijakan pemilihan siswa peserta Asesmen Nasional diserahkan kepada sekolah, sehingga sekolah dapat memilih siswa yang memiliki prestasi akademik yang mewakili sekolah untuk ikut pelaksanaan Asesmen Nasional." (Kepala SDN di Kabupaten Bekasi).

Dalam melaksanakan Asesmen Nasional, kepala sekolah menyatakan bahwa hambatan utama mereka adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung, seperti laptop atau komputer dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagian besar sekolah yang terkendala dalam hal ini adalah sekolah berstatus menumpang (70%). Kepala sekolah berharap kebijakan Asesmen Nasional dapat simultan dengan kebijakan pengadaan berbagai sarana pendukung yang diperlukan. Sebagian sekolah telah menerima bantuan TIK dari direktorat teknis terkait, namun penerima bantuan tersebut adalah sekolah-sekolah dengan kondisi sarana yang sudah bisa masuk dalam kategori mandiri, sementara sekolah dengan kondisi sarana minim dan jumlah siswa sedikit, masih belum mendapatkan bantuan tersebut.

Kendala berikutnya, terkait dengan kestabilan server pusat. Pada tahap pertama simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional, server pusat beberapa kali mengalami gangguan yang menyebabkan pelaksanaan Asesmen Nasional tidak berjalan lancar. Kendala ini dialami oleh sekolah yang memilih moda semi *online*. Akibat dari kendala ini, siswa peserta Asesmen Nasional menunggu server beroperasi normal sampai sore hari. Penundaan ini mengakibatkan kecemasan pada diri siswa dan mengganggu konsentrasi karena banyak energi terbuang selama menunggu.

Kendala lain yang dialami sekolah adalah terjadinya penggantian nama peserta ketika pelaksanaan Asesmen Nasional. Hal ini membuat kerepotan tersendiri bagi sekolah. Di salah satu sekolah bahkan terjadi penggantian terhadap 20 nama peserta, karena adanya perbedaan daftar nama peserta ketika simulasi dengan ketika gladi bersih. Perubahan ini membuat sekolah harus mempersiapkan peserta dan teknis lainnya secara cepat pada rentang waktu yang cukup pendek antara gladi bersih dan pelaksanaan Asesmen Nasional. Hal lain yang menjadi kendala adalah adanya data peserta yang tidak valid, yaitu nama siswa yang telah pindah sekolah, namun masih tercantum sebagai peserta Asesmen Nasional di sekolah tersebut, sementara data kepindahan siswa sudah dilaporkan ke dinas pendidikan sebelum masuk pra-tahapan Asesmen Nasional. Kasus ini diselesaikan dengan cara mengganti siswa tersebut dengan peserta cadangan.

Bagi sekolah yang menumpang, kendala yang dihadapi adalah terkait penyediaan transportasi menuju sekolah yang ditumpang. Sekolah yang menumpang harus membayarkan sejumlah uang untuk biaya menumpang. Besaran biaya tersebut pada umumnya disepakati bersama antara sekolah yang ditumpang dengan sekolah yang menumpang. Hal yang mengemuka pada proses menumpang yang diperoleh dari lapangan adalah koordinasi pembiayaan yang memberatkan sekolah penumpang, terutama jika sekolah induknya adalah sekolah swasta. Kendala lainnya adalah biaya transportasi siswa ke sekolah yang ditumpang dibebankan kepada orang tua masing-masing.

Kendala pendanaan lainnya yang umum terjadi di semua daerah sampel adalah pembiayaan Asesmen Nasional 2021 belum masuk dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga ada kelebihan anggaran yang harus ditanggung sekolah. Penggunaan dana BOS untuk membiayai pelaksanaan Asesmen Nasional terkendala pada pencairan dana BOS yang tidak tepat waktu. Hal ini kembali menyulitkan sekolah karena harus menutupi sementara dengan biaya yang diupayakan secara mandiri oleh sekolah.

Terkait konten, soal AKM yang muncul saat pelaksanaan Asesmen Nasional hari pertama sama dengan soal AKM yang diujikan ketika gladi bersih. Hal ini memudahkan siswa menyelesaikan soal dengan cepat karena soalnya sudah pernah dibahas di sekolah. Kondisi terkait variasi soal yang diujikan ini dipertanyakan oleh salah seorang kepala sekolah yang menjadi peserta DKT, karena Asesmen Nasional tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan dibagi secara bertahap dalam 4 gelombang pelaksanaan. Hal ini semakin membuka kemungkinan terjadinya kebocoran soal. Soal survei lingkungan belajar juga ditemukan beberapa opsi yang tidak sesuai, tidak terkoneksi antara soal dan jawabannya, serta ditemukan pertanyaan yang tidak relevan dengan kondisi sekolah yang homogen agamanya.

Sementara kendala yang dihadapi dinas pendidikan dalam melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah adalah mayoritas kepala sekolah yang telah berusia lanjut bahkan menjelang pensiun merasa enggan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan. Mereka terkesan sulit beradaptasi dengan teknologi, dan tidak termotivasi melakukan inovasi. Kondisi ini dinyatakan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, risalah kebijakan ini mengajukan beberapa saran kebijakan sebagai berikut.

1. Mendorong transformasi pembelajaran untuk meningkatkan capaian hasil Asesmen Nasional.

Dinas pendidikan dan sekolah berupaya meningkatkan capaian hasil belajar siswa dengan cara “instan”, yaitu meningkatkan pelatihan soal-soal AKM, namun kurang memberi perhatian terhadap transformasi pembelajaran. Oleh karena itu, Kemendikbudristek perlu memberikan pemahaman dan pendampingan kepada dinas pendidikan agar mengarahkan sekolah-sekolah meningkatkan mutu proses pembelajaran. Peningkatan capaian hasil Asesmen Nasional tidak dapat dilakukan dengan cara jangka pendek seperti metode *drill*, melainkan dengan pembelajaran yang berorientasi pada kesiapan belajar dan karakteristik siswa. Pelatihan dan pendampingan dalam melaksanakan asesmen awal pembelajaran (asesmen diagnostik) dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan kunci untuk meningkatkan capaian pembelajaran.

2. Dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan Asesmen Nasional.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh sekolah dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan bantuan TIK maupun dukungan anggaran yang disediakan pemerintah. Terkait bantuan TIK, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prioritas sasaran bantuan TIK kepada sekolah dengan kondisi sarana dan prasarana yang minim dan lebih membutuhkan. Sementara untuk dukungan anggaran dapat mengoptimalkan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Namun demikian, perlu analisis lebih lanjut mengenai kebutuhan riil pelaksanaan Asesmen Nasional, sehingga perhitungan biaya BOS untuk mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional dapat dipenuhi dan tidak mengganggu prioritas belanja kebutuhan peningkatan mutu pendidikan lainnya.

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Asesmen Nasional.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Asesmen Nasional dapat dilakukan antara lain dengan: a) sosialisasi tidak hanya kepada dinas pendidikan, kepala sekolah, proktor dan guru, namun juga kepada orang tua siswa untuk menghindari miskonsepsi; b) memperbaiki mutu dan variasi soal untuk menghindari asumsi hasil Asesmen Nasional tidak valid; c) menjamin keandalan server pusat untuk menghindari jaringan yang tidak stabil; dan d) meningkatkan sinkronisasi data peserta didik untuk menghindari ketidaksesuaian data peserta Asesmen Nasional.

Daftar Pustaka

- Kemdikbud. (2003). *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Kemdikbud. (2018). Infografis PISA Indonesia 2020. Infografis PISA 2018 - 1 rev.jpg (kemdikbud.go.id)
- Nehru, N. A. (2019). Asesmen Kompetensi Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional Pendidikan Indonesia: Analisis Dampak dan *Problem Solving* Menurut Kebijakan Merdeka Belajar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Novita, N., Mellyzar, M., & Herizal, H. (2021). Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1568>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021. Asesmen Nasional. Jakarta.
- Poerwanti, E., Widodo, E., Masduki, Pantiwati, Y.2018. *Asesmen Pembelajaran SD*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Rohim, D., C., Rahmawati, S., Ganestri, I., D. (2021). Konsep Asesmen Kompetensi Minimum untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Varidika*, 33(1), 54 - 62. <https://doi.org/10.23917/varidika.v33i1.14993>
- Safithrty, E., A. (2018). *Asesmen Teknik Tes dan Non Tes*. Malang: CV. IRDH
- Sudianto, S., & Kisno, K. (2021). Potret Kesiapan Guru Sekolah Dasar dan Manajemen Sekolah dalam Menghadapi Asesmen Nasional. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(1). <http://dx.doi.org/10.21831/jamp.v9i1.39260>
- Yusuf, A., M. 2017. *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan: Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh **Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827



Tim Penyusun

**Yunita Murdiyaningrum
Winda Nurpadilah
Hasti Kusumawati**